Journal of Politics and Policy Volume 2, Number 2, Juni 2020

Women as Environmental Cadres: Case Study in Activities of "Fostering Family Welfare"or PKK in Malang 2018

Perempuan sebagai Kader Lingkungan pada Aktivitas Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Malang Tahun 2018

[a]Irza Khurun'in, [b]Tia Subekti

Universitas Brawijaya

Malang, Jawa Timur, Indonesia

[a]irza.khurunin07@ub.ac.id, [b]bektitia@gmail.com

Abstract

Ecofeminism is present to bridge the study between ecology and feminism. He tried to connect the relationship between natural damage and the dominance of masculinity. Shiva and Mies strongly depicted women as natural caretakers of the environment in which it perpetuates traditional views on the gendered division of labor. This paper critically examines the ways in which women interpret their roles and relationships related to nature by using specific case study of women environmental cadres through PKK (Fostering Family Welfare) in Malang. This article argues that the women involvement in environmental conservation through PKK is not their acknowledgement of their distinct relationship to their natural environment. Instead, it was the product of hegemony of knowledge and power by government and environmental activists. It shows that ecofeminism ignores political aspects in which actually puts the burden of environmental damage on women with portraying women as "natural" agents that take charge of environmental conservation.

Keywords: *Ecofeminism; environmental conservation, women, Fostering Family Welfare; Malang*

Abstrak

Ekofeminisme hadir untuk menjembatani studi antara ekologi dan feminisme. Ekofeminisme muncul dengan menghubungkan antara kerusakan alam dan dominasi maskulinitas. Shiva dan Mies dengan kuat menggambarkan perempuan sebagai pengurus alami lingkungan yang mana pandangan tersebut justru melanggengkan pandangan tradisional tentang pembagian kerja berdasarkan gender. Tulisan ini mengkaji secara kritis cara-cara di mana perempuan menafsirkan peran dan hubungan mereka yang berkaitan dengan alam dengan menggunakan studi kasus spesifik yakni peran kader lingkungan perempuan melalui PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) di Malang. Tulisan ini berpendapat bahwa keterlibatan perempuan

dalam konservasi lingkungan melalui PKK bukanlah pengakuan mereka atas hubungan mereka yang berbeda dengan lingkungan alam mereka. Sebaliknya, itu adalah produk hegemoni pengetahuan dan kekuasaan oleh pemerintah dan aktivis lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa ekofeminisme mengabaikan aspek-aspek politik yang sebenarnya menempatkan beban kerusakan lingkungan pada perempuan dengan menggambarkan perempuan sebagai agen "alami" yang bertanggung jawab atas pelestarian lingkungan.

Kata kunci: Ekofeminisme; konservasi lingkungan, perempuan, PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga); Malang

PENDAHULUAN

Ekofeminisme muncul tahun 1970an guna menjawab tantangan terhadap ekologi feminis. Di tahun yang sama, Francoise D'Eaubanne membawa gerakan ekologi feminis ke dalam kajian konsep yang selanjutnya disebut dengan ekofeminis. Berikutnya, Shiva dan Mies menggunakan ekofeminis sebagai sebuah pendekatan baru dalam menganalisis isu perempuan dan ekologi.

Ekofeminis mengusung ide bahwa perempuan memiliki keterikatan alami dengan alam, oleh karenanya ada istilah *"mother earth"* atau ibu pertiwi. Yang kedua, ekofeminis memandang kerusakan yang terjadi terhadap alam adalah hasil dari dominasi maskulinitas, termasuk dominasi laki-laki terhadap perempuan sekaligus alam. Dominasi maskulinitas mengakibatkan eksploitasi secara massif. Sementara itu, kerusakan alam sama halnya dengan kerusakan perempuan. Demikian ungkapan yang di bawa oleh ekofeminis. Pasalnya, perempuan menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban ketika terjadi kerusakan alam.

Berangkat dari asumsi tersebut, ekofeminis mengajukan solusi dengan mengeliminasi doinasi laki-laki terhadap perempuan dan alam. Yang kedua, mendorong perempuan aktif terlibat dalam konservasi lingkungan. Meskipun, bagaimanapun juga hal itu berimplikasi sebaliknya, memberikan beban ganda terhadap perempuan.

Beban yang pertama, perempuan harus bertanggung jawab atas labelisasi yang mereka emban terhadap tugas domestik. Yang kedua, alih-alih menghentikan eksploitasi terhadap alam, justru perempuan yang diminta bertanggung jawab terhadap konservasi lingkungan dengan landasan labelisasi sifat *nurture* dan *caring* yang dimiliki oleh perempuan.

Alih-alih mengurangi dominasi patriarki yang telah mengakar, di beberapa kasus malah memperkuat dominasi. Peneliti mengambil kasus keterlibatan perempuan sebagai kader lingkungan pada konservasi lingkungan di Kota Malang. Kota Malang memiliki program atau kebijakan yang disebut konservasi lingkungan melalui PKK

(Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga). Dalam artikel ini, penulis memberikan kritik dari logika eko-fisik yang mengecualikan aspek-aspek politik dan kerentanan kekuasaan serta hegemoni pengetahuan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggali dan memahami makna secara induktif (Creswell, 2012). Metode ini dapat memberikan narasi analisis mengenai perilaku manusia yang berlangsung secara kontinyu (Bogdam & Taylor, 1984). Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus yakni aktifitas PKK di Kota Malang tahun 2018. Studi kasus adalah tipe penelitian untuk mempelajari, menjelaskan, dan atau menginterpretasi kasus yang sedang terjadi (Salim, 2011)

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yakni data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui interview mendalam dan data sekunder dikumpulkan melalui media, dokumen kebijakan, dan penelitian terdahulu. Teknik analisis data dilakukan dengan metode metode pencocokan pola, antara pola dari hasil penelitian empiris dengan pola yang diprediksi (Yin, 2011). Langkah analisis data adalah dengan membuat preposisi, membuat perbandingan antara temuan penelitian dan preposisi, mengkaji ulang preposisi, dan dan menyelesaikan proposisi dan mengembangkan desain model berdasarkan temuan yang dihasilkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perempuan sebagai kader lingkungan, studi pada aktivitas PKK di Kota Malang

a. Isu Lingkungan di Kota Malang

Isu lingkungan di Kota Malang menjadi salah satu fokus pemerintah Kota Malang di tahun 2018. Malang menghadapi berbagai tantangan terkait lingkungan. Sebagai kota pendidikan, ribuan mahasiswa baru dari berbagai kota datang dan tinggal di Malang. Implikasinya adalah kemacetan, polusi udara, peningkatan suhu, dan masalah sampah rumah tangga yang semakin menumpuk. Pemerintah menyebutkan bahwa suhu di Kota Malang telah mengalami peningkatan selama 10 tahun belakangan. Mereka mengatakan hal itu disebabkan oleh emisi karbon. Tabel di bawah ini adalah data yang menunjukkan peningkatan temperature udara di Kota Malang.

Tabel 1. Peningkatan Temperatur Udara Di Kota Malang

No.	Tahun	Temperatur Udara
1.	1997	23,4˚ celcius
2.	2006	24,2˚ celcius
3.	2007	33˚ celcius
4.	2008	34˚ celcius
5.	2015	35˚ celcius

Data: diolah peneliti, 2018

Berbagai kebijakan telah dibuat untuk menghadapi permasalahan lingkungan, misalnya dengan merevitalisasi hutan kota dan menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH), pengolahan sampah, dan konservasi lingkungan melalui kader lingkungan di masing-masing sub-distrik. Kader lingkungan dibentukan di tingkat RT (Rukun Tetangga), yakni tingkatan yang terendah dalam struktur pemerintah lokal yang selanjutnya di dalamnya terdapat PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga). PKK menitikberatkan aktivitas yang "harus" dilakukan oleh perempuan dalam keluarga, salah satunya menjadi kader lingkungan untuk melakukan konservasi lingkungan.

b. Konservasi Lingkungan oleh Ibu-Ibu PKK di Kota Malang

PKK adalah organisasi perempuan yang hadir tahun 1957 ketika ada seminar tentang perekonomian rumah tangga. Kemudian di tahun 1967 secara legal dibentuk oleh pemerintah Indonesia. Di awal mula terbentuknya PKK ditujukan untuk mengakomodasi fungsi istri dalam keluarga. Hal itu diinisiasi oleh Istriati Moenadi, seorang istri Gubernur Jawa Tengah pada saat itu. Kemudian, sosialisasi PKK kepada masyarakat khususnya perempuan, meskipun mereka belum melaksanakan fungsi sebagai istri. Hal ini didorong oleh kejadian kelaparan yang melanda beberapa daerah di Indonesia pada waktu itu. Hingga saat ini aktivitas PKK masih aktif dilakukan oleh kelompok perempuan di masyarakat. Dasar hukum PKK saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan Keluarga dan Kesejahteraan.

PKK bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ada 10 program utama, yaitu: 1) Memahami dan mempraktikkan Pancasila; 2) Gotong Royong; 3) Pangan; 4) Sandang; 5) Perumahan dan tatalaksana rumah tangga; 6) Pendidikan dan keterampilan; 7) Kesehatan; 8) Pengembangan kehidupan berkoperasi; 9) Kelestarian

lingkungan hidup; dan 10) Perencanaan yang sehat. Sementara itu struktur kelembagaan PKK diatur mulai dari tingkat pusat dengan ketua umum istri Menteri Dalam Negeri hingga manajemen hingga tingkat RT. Istri Menteri Dalam Negeri bertindak sebagai kepala PKK Nasional. Struktur kelembagaan disusun untuk tingkat pemerintahan terendah, yaitu tingkat RT, yang diketuai oleh istri Ketua RT.

Di tingkat RT, PKK berisi Kelompok Kerja (disebut Kelompok Kerja atau Pokja). Melalui kelompok kerja yang telah dibentuk, ibu rumah tangga dapat turun dan berpartisipasi aktif dalam lingkungannya. Berikut ini adalah tugas dan fungsi masing-masing Kelompok Kerja PKK di tingkat Lingkungan.

Tabel 2. Kelompok Kerja dalam PKK

No.	Kelompok Kerja	Tugas dan Fungsi
1.	Pokja I	Keagamaan
2.	Pokja II	Keterampilan
3.	Pokja III	Lingkungan
4.	Pokja IV	Kesehattan

Sumber: Interview dengan ketua PKK RT 8 RW 9, Merjosari, Malang, pada Juni 2018

PKK memiliki peran dalam pelestarian lingkungan meskipun tidak dominan. Kegiatan konservasi lingkungan yang dilakukan oleh PKK adalah bentuk sederhana dari kegiatan konservasi. Keterbatasan keterampilan yang dimiliki serta waktu adalah faktor utama untuk memilih bentuk konservasi paling sederhana. Selain itu, anggota PKK adalah perempuan, yang sampai sekarang di Indonesia, mereka memiliki tanggung jawab besar dalam urusan rumah tangga khususnya pekerjaan domestik dalam rumah tangga. Terlebih lagi, bagi perempuan perkotaan, bekerja untuk mencari nafkah adalah penting untuk mendukung ekonomi keluarga. Sehingga, pilihan kegiatan sederhana tidak akan membebani mereka.

Melalui Kelompok Kerja IV perempuan yang menjadi anggota PKK di setiap RT di Malang menyusun beberapa agenda terkait pelestarian lingkungan. Setidaknya ada lima kegiatan yang dilakukan oleh PKK. Pertama, penanaman tanaman obat keluarga (toga). Kegiatan ini merupakan upaya untuk mengembalikan tradisi menggunakan obat tradisional dan meminimalkan penggunaan obat-obatan kimia dalam penyembuhan penyakit sederhana dalam keluarga. Tanaman ini termasuk kunyit, jambu biji, daun katuk, jahe, jeruk nipis, dll. Jenis tanaman ini digunakan sebagai pertolongan pertama untuk beberapa penyakit seperti sakit perut, batuk, demam, diare, atau masuk angin.

Kedua adalah membersihkan lingkungan secara teratur. Kesehatan lingkungan dimulai dengan kebersihan lingkungan. Kegiatan pembersihan lingkungan rutin

biasanya dilakukan setiap minggu atau 2 minggu. Kegiatan dilakukan dengan menyapu atau membersihkan sampah kotor untuk mengurangi perkembangbiakan penyakit pembawa larva.

Ketiga, pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah di Sekitar juga ditangani oleh PKK. PKK mengatur pengumpulan sampah setiap hari dengan mengenakan biaya warga untuk membayar pekerja sampah. Kontribusi dibebankan kepada setiap kepala keluarga sebesar Rp. 25.000. Pengelolaan limbah juga dilakukan oleh PKK.

Sementara itu, pengelolaan sampah dilakukan oleh ibu rumah tangga yang menjadi anggota PKK. Di RT 8 RW 9 Desa Merjosari, ibu rumah tangga anggota PKK mengelola sampah dengan mengumpulkan sampah plastik untuk dikelola oleh bank sampah di RT mereka. Bank sampah dikelola oleh pemuda masjid di lingkungan setempat. Nantinya, hasil dari penjualan sampah plastik akan digunakan untuk kegiatan masjid. Sementara itu di RT 4 RW 14 Desa Mojolangu, PKK, didampingi LSM Masyarakat Kemanusiaan Sosial (KSK), memanfaatkan sampah plastik menjadi barang-barang rumah tangga. KSK memiliki program *"Trash to Creation"*, yang bekerja sama dengan PKK untuk memanfaatkan limbah plastik. Berikut ini adalah contoh limbah rumah tangga olahan yang telah dibuat.

Gambar 1. Daur Ulang Sampah Plastik oleh PKK Desa Mojolangu

Sumber: dokumentasi oleh Siana, Koordinator KSK, 2018

PKK tidak hanya mengelola sampah plastik tetapi juga sampah organik. PKK di Merjosari pada April 2018 mengadakan pelatihan membuat selai dari kulit buah naga. Ini disebabkan tingginya konsumsi buah naga dan adanya nutrisi dalam kulit untuk komodo.

Keempat adalah pemanfaatan halaman rumah atau pekarangan. Pemanfaatan pekarangan dilakukan dengan mendorong ibu rumah tangga untuk menanam tanaman yang bermanfaat bagi kebutuhan keluarga, seperti menanam buah, sayuran dan rempah-

rempah. Di RT 8, PKK sering membeli benih bersama, kemudian dikelola oleh ketua RT. Misalnya jambu biji, stroberi, selada, sawi, dan jenis sayuran lainnya. Menanam buah dan sayuran dilakukan dengan menggunakan polybag.

Kelima adalah penetapan area merokok. PKK RT 8 RW 9 Desa Merjosari memprakarsai gerakan untuk melarang merokok di dalam rumah. Anggota PKK meminta semua ibu rumah tangga untuk melarang suami mereka merokok di dalam rumah. Mereka meletakkan asbak rokok di luar rumah dan memasang poster larangan merokok di sekitar lingkungan. Itu bertujuan untuk menjaga kesehatan udara di dalam rumah.

Gerakan lingkungan perempuan melalui PKK tidak dapat dipisahkan dari dorongan pemerintah, akademisi, dan LSM. Berbagai upaya telah dilakukan untuk merangsang partisipasi ibu rumah tangga untuk bergabung secara aktif dalam PKK. Mereka adalah, pertama sering mendapatkan bantuan dari LSM, akademisi dari berbagai universitas dan mahasiswa di kota Malang. Kedua, kompetisi kebersihan lingkungan yang diadakan oleh pemerintah kota mendorong PKK untuk aktif dalam kebersihan lingkungannya. Ketiga, ada bimbingan dan pengawasan PKK di tingkat nasional.

Konservasi Lingkungan oleh Anggota PKK dalam Kajian Ekofeminisme

a. Perempuan dalam Sosial Masyarakat: Sebuah Tinjauan Singkat

Kondisi masyarakat di Indonesia, khususnya di Jawa Timur atau di Kota Malang masih menganggap perempuan sebagai “istri” adalah *“konco wingking”* atau teman di belakang. Artinya, posisi perempuan berada di belakangnya laki-laki atau suami mereka. Labelisasi tentang peran gender menyematkan pekerjaan domestik adalah tanggung jawab perempuan. Sifat *caring and nurturing* yang dilekatkan pada perempuan menjadikan mereka bertanggung jawab atas pemeliharaan lingkungan.

Pergerakan perempuan di Indonesia secara umum telah memiliki sejarah yang cukup panjang. Mulai dari era kolonial Belanda hingga saat ini. Awal abad ke-20 studi tentang feminisme masuk ke Indonesia. Maka, lahirlah pemikiran-pemikiran seperti yang dituangkan oleh R.A. Kartini dan Dewi Sartika. Pernah memiliki peran penting dalam perjalanan perjuangan kemerdekaan Indonesia, tidak membuat posisi perempuan dalam masyarakat berubah. Stigmatisasi peran gender yang melekat masih ada hingga saat ini.

Titik balik posisi perempuan dalam ranah pergerakan adalah pada era Order Baru.

Di bawah kepemimpinan Soeharto, negara semakin mengatur dan membatasi pergerakan perempuan. Terdapat arah untuk semakin membawa perempuan ke ranah privat dan upaya “ibuisme” terhadap perempuan; bahwa perempuan adalah ibu yang merawat dan mengasuh dan tidak memiliki kapabilitas untuk beraktifitas di ranah publik. Negara mengatur segala aktivitas perempuan dan menempatkannya dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan rumah tangga.

Di sinilah institusionalisasi peran gender yang dilakukan oleh negara sebagai bentuk untuk mengatur perilaku dan aktivitas perempuan. Pemerintah membentuk organisasi perempuan di bawah kendalinya seperti Dharma Wanita yang berisi istri-istri pegawai negeri, dan Dharma Pertiwi untuk istri-istri ABRI. Pemerintah menginternalisasi nilai-nilai dalam organisasi, yaitu kewajiban perempuan untuk bekerja dalam urusan rumah tangga atau rumah tangga. Dalam istilah Jawa, urusan wanita adalah 3 M (Masak, Macak, Manak atau memasak, berdandan, dan membawa), *“Manut in Pandum”* atau menerima semua hadiah yang berarti hadiah dari Tuhan dan dari suami, “*Konco Wingking*” atau teman di belakangnya berarti wanita di belakang laki-laki.

Era reformasi dan pasca reformasi, perempuan kembali menunjukkan dirinya dengan terlibat aktif dalam pemerintahan, ranah publik, serta aktivitas-aktivitas lainnya. Pintu-pintu pekerjaan serta akses pendidikan untuk perempuan terbuka lebar. Namun demikian, PKK sebagai hasil dari pemerintahan era Orde Baru masih dipertahankan hingga saat ini.

Munculnya gerakan perempuan tidak secara spontan membuat gerakan perempuan ala pemerintah era orde baru menghilang. Dharma Wanita dan PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), selanjutnya akan disebut PKK, yang muncul di era Orde Baru terus diabadikan oleh pemerintah sampai sekarang. Organisasi-organisasi itu adalah produk gagal dari pemerintah era Orde Baru yang masih digunakan sampai sekarang. Ini meninggalkan ide kesetaraan. Ini mencerminkan bahwa pemerintah melanggengkan dominasi laki-laki terhadap perempuan dan maskulinitas terhadap feminitas.

Sebuah refleksi dari dominasi maskulinitas atas feminitas dapat ditangkap dari gerakan lingkungan di Kota Malang. Salah satu gerakan lingkungan di Kota Malang adalah melalui Program Utama PKK. Perempuan dijadikan kader lingkungan yang bertujuan untuk konservasi lingkungan melalui 'pemberdayaan perempuan'. Proposisi 'pemberdayaan perempuan' ini tampaknya memberikan ruang bagi perempuan, tetapi sebenarnya hanya ruang semu yang diperoleh perempuan.

b. Ekofeminisme: Sebuah Kajian Alternatif tentang Perempuan dan lingkungan

Feminisme modern mengasumsikan bahwa individu adalah makhluk otonom yang bebas dari pengaruh lingkungan, sehingga para pakar ekologi hadir untuk menghubungkan keterkaitan individu dengan lingkungan. Kerusakan dan kehancuran alam dalam pandangan ekofeminisme berkaitan erat dengan dominasi alam dan dominasi perempuan. Rosemary Radford Ruether, misalnya, mengatakan bahwa perempuan harus menafsirkan bahwa tidak akan ada solusi ekologis jika model relasional dalam bentuk dominasi masih dipertahankan.

Vandana Shiva dan Maria Mies dalam buku mereka yang berjudul *Ecofeminism* membuat sebuah kajian khusus tentang peran perempuan dalam melindungi alam. Mereka menamakannya sebagai ekofeminisme. Ekofeminisme muncul pada tahun 1970-an oleh Francoise D'Eaubanne, yang kemudian menjadi subjek kritik sosiologis. Krisis lingkungan bukan lagi hal baru bagi masyarakat atau pemerintah. Krisis lingkungan saat ini berakar pada kesalahan perilaku manusia. Krisis lingkungan, menurut Arne Naess, dapat diatasi dengan mengubah perspektif dan perilaku manusia secara mendasar dalam melihat lingkungan dan manajemen lingkungan.

Ekofeminisme ada sebagai alternatif bagi etika lingkungan yang ingin menuntut dan mematahkan sudut pandang dominan yang berlaku dalam masyarakat modern dan pada saat yang sama menawarkan perspektif dan perilaku baru untuk mengatasi krisis lingkungan saat ini (Keraff 2010, 144). Diskusi ekofeminis terbagi menjadi dua, yang pertama mematahkan logika dominasi yang merupakan penyebab utama krisis ekologis terkait dengan hubungan gender. Kedua, akan membahas etika alternatif yang menjadi perhatian yang diprioritaskan oleh para pakar lingkungan.

Krisis lingkungan menurut sudut pandang ahli ekologi dapat dilihat dari berbagai perspektif: antroposentris, androsentrik, dan ekosentris. Bagi ekofeminisme, krisis ekologis tidak hanya disebabkan oleh perspektif dan perilaku antroposentris, tetapi juga oleh androsentris dan ekosentris (Keraff, 2010: 151). Dalam tiga sudut pandang ini, dominasi manusia (non-alam) atas non-manusia (alam) adalah menjadi penyebab utama. Logika dominasi menurut Karren J. Warren adalah struktur dan cara berpikir yang cenderung membenarkan dominasi dan subordinasi (Keraff, 2010: 152). Oleh karenanya, ekofeminisme percaya bahwa struktur dan institusi sosial dan politik harus diubah secara radikal untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi dominasi manusia, penindasan dan eksploitasi alam (Keraff, 2010: 155).

c. Kritik Ekofeminis terhadap Penunjukan Perempuan sebagai Kader Lingkungan dalam PKK

Keterlibatan perempuan dalam pengelolaan lingkungan adalah penting sebab posisi perempuan dalam relasinya dengan lingkungan ada dua; yang pertama perempuan sebagai kelompok yang mengalami dampak kerusakan lingkungan, kedua perempuan berperan sebagai agen pelestarian lingkungan melalui perannya sebagai istri dan ibu-ibu PKK.

Kaitan antara perempuan dan lingkungan mendorong munculnya ekofeminisme atau feminisme ekologis. Pemikiran ini muncul salah satunya didukung oleh fakta bahwa perempuan menjadi pihak yang sangat dipengaruhi oleh kerusakan lingkungan. Budaya patriarki dianggap telah merusak sumber daya alam tanpa memperhatikan dampak jangka panjangnya. Dalam pandangan ekofeminisme, perlindungan berbagai bentuk kehidupan di bumi dan budaya masyarakat manusia adalah prasyarat untuk mempertahankan kehidupan di planet ini. Andit Enri Anpa dalam penelitiannya yang berjudul "Dampak Kerusakan Lingkungan terhadap Perempuan dan Anak" menunjukkan hasil bahwa ada kaitan antara kerusakan lingkungan dengan nasib perempuan. Dia melihat bahwa kerusakan lingkungan memiliki dampak langsung pada kemiskinan yang pada gilirannya menyebabkan kejahatan pada perempuan dalam bentuk perdagangan manusia. Lebih jauh, kasus kebakaran hutan di Riau pada 2016 juga menunjukkan fakta bahwa perempuanlah yang paling terkena dampak masalah tersebut. Peningkatan produksi minyak sawit menghasilkan peningkatan penggunaan pestisida yang didasarkan pada polusi dalam aliran sungai. Sementara itu, sebagai ibu rumah tangga, kegiatan sehari-hari perempuan bergantung pada sungai dan ketersediaan air bersih.

Selain sebagai korban, dalam kasus lain perempuan memiliki potensi besar dalam upaya pelestarian lingkungan. Saat ini, berbagai penelitian, terutama di Indonesia, telah menunjukkan bahwa perempuan memiliki posisi penting dalam urusan lingkungan. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dian Wismar'ein et al. Berjudul "Perempuan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Desa Rahtawu, Kabupaten Kudus". Kedua, Yulanda Caesfa, et al (2013) berjudul "Persepsi Perempuan terhadap Lingkungan dan Partisipasi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Kasus Desa di Desa Babakan, Kabupaten Dramaga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat)". Ketiga, Nur Fadhilah et al (2017) berjudul "Perempuan dan Konservasi Lingkungan: Studi Bank Sampah Intan

Malang Jawa Timur".

Kritik ekofeminisme yang pertama adalah bahwa mayoritas kegiatan PKK berada di ruang privat, dan sedikit di ruang publik. Kedua, dominasi pemilik kekuasaan dan pemilik pengetahuan memaksa perusahaan untuk terlibat dalam ruang publik atau PKK. Artinya, PKK adalah tindakan praktis yang lahir dari paksaan dan bukan kesadaran. Ketiga, Program Dasar PKK benar-benar mengembalikan perempuan dalam kegiatan domestik. Keterkaitan perempuan dengan lingkungan tidak membuat dominasi maskulinitas berkurang.

Buktinya, eksploitasi alam terus berlanjut. Kegiatan penghijauan, pemilahan limbah, dan penanaman toga bukanlah inti dari gerakan perempuan di bidang lingkungan menurut ekofeminisme. Inti dari ekofeminisme adalah meminimalkan atau menghilangkan dominasi satu hal terhadap yang lain. Dominasi manusia atas alam (antroposentris), dominasi laki-laki terhadap perempuan, dominasi ekonomi atas lingkungan (ekosentris), dan dominasi maskulinitas atas feminitas adalah bukti keberadaan dalam kenyataan yang menunjukkan bahwa dalam gerakan perempuan, perempuan tidak bergerak atas dasar ide dan perasaan mereka tetapi atas dasar dorongan dari pemerintah daerah dan LSM. Artinya, hegemoni kekuasaan dan pengetahuan berlaku dalam membentuk perilaku seseorang seperti yang disampaikan oleh Antonio Gramsci.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari artikel ini adalah keterlibatan perempuan dalam konservasi lingkungan melalui PKK bukanlah pengakuan terhadap posisi perempuan yang setara dengan laki-laki. Sebaliknya, itu adalah produk hegemoni pengetahuan dan kekuasaan oleh pemerintah dan aktivis lingkungan. Ini menunjukkan bahwa ekofeminisme mengabaikan aspek-aspek politik yang sebenarnya menempatkan beban kerusakan lingkungan pada perempuan dengan menggambarkan perempuan sebagai agen "alami" yang bertanggung jawab atas pelestarian lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Bogdan, & Taylor. (1984). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-ilmu Sosial* . Surabaya: Usaha Nasional.

Caesfa, Y., et al. (2013). Persepsi Perempuan Terhadap Lingkungan Hidup Dan Partisipasinya Dalam Pengelolaan Sampah Rumahtangga (Kasus sebuah Kampung di Desa Babakan, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 165-181.

Creswell, J. (2012). *Education Research, Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. 4th Edition.* Boston: Pearson.

Howell, N. (1997). Ecofeminism: What One Needs to Know. *Zygon*, 32(2):231 241.

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=115372&val=5284&title=DAMPAK%20KERUSAKAN%20LINGKUNGAN%20TERHADAP%20PEREMPUAN%20DAN%20ANAK diakses pada 5 juli 2018 pukul 22.00

http://redaksiriau.co/mobile/detailberita/8742/perempuan-adalah-korban-kerusakan-lingkungan.html dikases pada 6 juli 2018 pukul 20.00 WIB

Interview with Ninis Head office of PKK in Merjosari, in July 8th 2018 in 05.00 PM

Keraf, A. Sonny. (2010). *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Khotimah, E. (2006). Pembangunan Dalam Perspektif Ekofeminisme (Analisis Kritis Paradigma Teori Pembangunan Dan Urgensi Pembangunan Perspektif Demokratis Kulturis Dalam Upaya Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. *Mimbar*, 22(3) Juli – September: 333- 354.

Nur Fadhilah dkk (2017) yang bertajuk "Perempuan Dan Konservasi Lingkungan: Studi Bank Sampah Berlian Malang JawaTimur". Jurnal Al-Tahrir, Vol. 17, No. 2 November 2017 : 269-288

Salim, A. (2001). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Buku Sumber untuk Penelitian Kualitatif (Edisi Kedua).* Yogyakarta: Tiara Wacana.

Shiva, V. and Maria Mies. (1988). *Ecofeminism*. London: Verso.

Shiva, V. (1988). *Staying Alive: Women, Ecology and Development*. London: Zed Books

Yin, R. K. (2011). *Studi Kasus: Desain dan Metode* . Jakarta: Rajagrafindo Persada.